



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 26 April 2018

Halaman: 13

KONFLIK SOSIAL
Perjuangan Warga Terban Menolak
Apartemen Jalan Terus

JOGJA—Penolakan warga Kampung Terban, Kelurahan Gondokusuman terhadap pembangunan apartemen di wilayah mereka terus berlanjut. Warga yang tergabung dalam Forum Penolak Pembangunan Apartemen Dhiaka Universe (dulu bernama Taman Melati Sardijito) wadul ke DPRD Kota Jogja, Selasa (24/4).

Dalam audiensi itu, warga menyampaikan setidaknya tiga poin mendasar. Menurut warga, ketiga poin itu tak hanya harus segera dicermati para legislator, melainkan juga pihak-pihak terkait. "Salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja," kata Sekretaris Forum Penolak Pembangunan Apartemen, Tulus Wardaya saat ditemu sebelum audiensi, kemarin.

Sebelum memasuki proses advokasi, menurut Tulus, DPRD Kota Jogja

hendaknya segera memeriksa mekanisme perizinan PT Adi Persada Property (APP) selaku pengembang apartemen tersebut. Begitu juga terkait dengan izin mendirikan bangunan (IMB) dan dampak sosial yang ditimbulkan akibat pembangunan apartemen tersebut.

"Cek itu IMB-nya, sudah legal atau belum? Dan yang paling penting membahas dampak sosial yang ditimbulkan pembangunan apartemen itu," ucap dia.

Diakuinya, sejumlah dampak sosial yang akan muncul pasca-berdirinya apartemen adalah terganggunya sirkulasi air dan akses udara serta cahaya yang terhalang bangunan apartemen menjadi hal penting yang harus diperjuangkan dalam proses advokasi.

Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja, Nasrul Khoiri mengatakan akan melaksanakan proses advokasi. Dalam audiensi Nasrul mengatakan kasus warga kampung Terban dengan PT APP merupakan gambaran dari proses dinamika perubahan sosial Kota Jogja di mana rumah horizontal mulai beralih menjadi rumah vertikal. Apabila dampak sosial akibat perubahan tersebut tak dipahami dengan bijak, maka akan menjadi masalah sosial.

Oleh karena itu Nasrul pun menawarkan tahapan proses kepada warga penolak pembangunan apartemen dengan beberapa langkah. "Pertama kami akan mempelajari dokumen dari warga yang telah masuk, kami beri waktu sepekan lagi agar warga melengkapi dokumen. Jika sudah, kami akan undang pihak eksekutif [DLH, Satpol PP]

dan pengembang untuk hadir advokasi," kata Nasrul.

Seperti diketahui penolakan warga itu sudah muncul sejak 2015 lalu. Bahkan hingga nama calon apartemen yang akan berdiri di wilayah itu sudah berganti, penolakan warga terus terjadi. Sampai sekarang masih belum ada kesepakatan antara pihak pengelola dengan warga masyarakat. (*Salsabila Annisa Azmi*)

2016

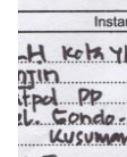
• Juni
Warga RT 01 RW 01 Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman pertama kali mengegaskannya penolakan rencana pembangunan apartemen 13 lantai di lahan seluas 4.900 meter persegi di wilayah mereka.

• Juli
Warga wadul ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja.

2017

• Pengembang yang sudah mengganti namanya kembali mengajukan persyaratan baru untuk mengurus dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
• Warga wadul ke DPRD Kota Jogja.

Linimasa Penolakan Warga Terban



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Terban			
3. Forpi			
4. Dinas Lingkungan Hidup			
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005